

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Saat ini banyak sekali usaha yang berkembang di Indonesia. Berbagai jenis usaha yang terdapat di Indonesia mulai dari bidang kuliner, fashion, pendidikan, otomotif, agribisnis dan juga teknologi internet. Usaha-usaha tersebut dapat disebut sebagai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat dibedakan dengan kriteria yang diatur dalam UU RI No.20, Tahun 2008. Di dalam UU No.20 Tahun 2008 pasal 3 menjelaskan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Maka dari itu UMKM merupakan bagian dari penopang perekonomian di Indonesia.

Krisis yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang melanda seluruh negara khususnya di Asia, Indonesia pun juga mengalami dampak dari krisis moneter yang diakibatkan oleh nilai tukar rupiah yang turun terhadap dollar AS yang terjadi. Namun pada saat terjadinya krisis tersebut UMKM yang menjadi sektor tumpuan ekonomi Indonesia untuk dapat tetap menstabilkan perekonomian di Indonesia. Selain itu UMKM juga membantu pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja secara optimal. Dibandingkan dengan usaha-usaha besar lainnya yang justru hancur dengan kebangkrutan yang dialami. UMKM sendiri yang masih tetap berdiri kokoh walaupun dalam keadaan krisis moneter yang dialami oleh Indonesia. Pada UU No. 20 Tahun 2008 tentang Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah terdapat pada Bab III pasal 5 yang menjelaskan peran UMKM bagi Indonesia: meningkatkan peran usaha mikro, kecil, menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Peran UMKM juga di dukung oleh data yang menunjukkan bahwa UMKM terus menjamur di setiap tahunnya. Terdapat sandingan data yang terdapat di Departemen Koperasi (2015) pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB)

No.	Indikator	Satuan	Tahun 2013		Tahun 2015	
			Jumlah	Pangsa (%)	Jumlah	Pangsa (%)
1.	Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	(Unit)	57.895.721	99,99	59.262.772	99,99
	Usaha Mikro (UMi)	(Unit)	57.189.393	98,77	58.521.987	98,74
	Usaha Kecil (UK)	(Unit)	654.222	1,13	681.552	1,15
	Usaha Menengah (UM)	(Unit)	52.106	0,09	59.263	0,1
2.	Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.066	0,01	4.987	0,01

Sumber: Departemen Kementerian dan Koperasi

Data di atas dapat menjelaskan bahwa UMKM telah membuktikan sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia. Maka dari itu UMKM dapat diperhitungkan keberadaannya. Namun terdapat permasalahan yang selalu ditemukan di dalam UMKM itu sendiri yaitu, UMKM masih belum melakukan pencatatan laporan keuangan mereka dapat dikatakan sangat rendahnya pemahaman para pelaku usaha dalam melakukan pencatatan laporan keuangan. Dikutip dari laman Banten Bisnis terdapat berita mengenai kelemahan pengelola keuangan pada UMKM. Kelemahan pengelola keuangan pada UMKM yaitu masih bercampurnya uang pribadi atau pemilik serta uang operasional usaha itu sendiri.

Laporan keuangan merupakan bagian penting dalam sebuah perusahaan yang didirikan. Hal tersebut dapat mengukur seberapa sehat usaha yang dijalankan. Informasi akuntansi dapat menjadi dasar yang handal bagi pengambilan keputusan ekonomis dalam pengelolaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), antara lain keputusan pengembangan pasar, penetapan harga dan lain-lain.

Terdapat sepuluh kualitas laporan keuangan yaitu dapat dipahami, relevan, materialitas, keandalan (*reliable*), penyajian jujur, substansi mengungguli bentuk, netralitas, pertimbangan sehat, kelengkapan, dan dapat dibandingkan. Dapat dipahami diartikan sebagai laporan keuangan yang mudah untuk dipahami oleh pemakai. Relevan merupakan laporan keuangan yang harus sesuai dengan tujuan operasional perusahaan dan memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Materialitas merupakan suatu laporan atau fakta yang dipandang material apabila kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan

mencatat informasi dapat memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan analisis bahwa keadaan lain sebagai bahan pertimbangan lengkap. Keandalan (*reliable*) merupakan informasi laporan keuangan harus bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainnya sebagai sebuah penyajian yang tulus dan jujur (*faithful representation*). Penyajian jujur merupakan informasi akuntansi harus menggambarkan kejujuran transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Substansi mengungguli bentuk yaitu, jika dimaksudkan untuk menyajikan informasi dengan jujur, maka transaksi perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya bentuk hukumnya. Netralitas merupakan informasi akuntansi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Pertimbangan sehat merupakan informasi yang disajikan mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian. Kelengkapan merupakan informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya, dan dapat dibandingkan, diartikan bahwa informasi akuntansi harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya serta dapat dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.

Namun, UMKM di Indonesia masih saja belum menggunakan laporan keuangan sebagai pembantu dalam mengembangkan usaha yang mereka jalankan. Salah satu UMKM yang masih belum menggunakan laporan keuangan yang sesuai standar yang ditetapkan yaitu *Nursery Floribunda* yang berada di Bintaro. Usaha tersebut bergerak di bidang agribisnis hortikultura dimana subsektor di dalamnya adalah florikultura. Hortikultura merupakan salah satu fokus budidaya tanaman kebun. Hortikultura memiliki beberapa fokus atau komoditi yaitu tanaman buah (pomology/frutikultur), tanaman bunga (florikultura), tanaman sayuran (olerikultura), tanaman obat-obatan (biofarmaka), dan taman (lansekap). Florikultura merupakan salah satu subsektor yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan baru sektor yang dikembangkan dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani, memperluas lapangan pekerjaan, pariwisata serta menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman. Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik (2017), perkembangan perusahaan hortikultura yang

terdaftar sebanyak 139 perusahaan. Terdiri dari beberapa pulau yaitu terdapat pada Tabel 2.

Tabel 2. Persebaran Perusahaan Hortikultura 2017

NO.	Nama Pulau	Jumlah Perusahaan	Persentase
1.	Sumatera	23 Perusahaan	16,55%
2.	Jawa	90 Perusahaan	64,75%
3.	Bali dan Nusa Tenggara	13 Perusahaan	9,35%
4.	Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua	13 Perusahaan	9,35%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Data di atas memberikan informasi mengenai persebaran perusahaan Hortikultura yang ada di Indonesia. Persebaran perusahaan hortikultura tersebut mencakup beberapa jenis tanaman yang di perjual belikan yaitu terdapat pada Tabel 3. Data tersebut menjelaskan tentang komoditi perusahaan hortikultura di tahun 2017.

Tabel 3. Komoditi Perusahaan Hortikultura

No.	Jenis Komoditi	Persentase
1.	Tanaman Hias	30,22%
2.	Buah-Buahan	28,06%
3.	Sayuran	20,86%
4.	Campuran	19,42%
5.	Biofarmaka (Obat-Obatan)	1,44%

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017)

Komoditi terbesar di Indonesia adalah tanaman hias atau dapat disebut juga denga florikultura. Salah satu yang memanfaatkan florikultura adalah Nursery Floribunda yang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Nursery Floribunda memiliki produk berupa bunga dan tanaman hias yang diambil dari perkebunan. Perusahaan ini sudah berkembang cukup lama di dunia bisnis, namun Floribunda ini belum melakukan pencatatan laporan keuangannya berdasarkan standar akuntansi keuangan yang sudah ada.

Salah satu staff keuangan *Nursery Floribunda* memberikan pernyataan bahwa menurut beliau laporan keuangan tidak perlu untuk usaha yang dijalankan, karena menurutnya pemilik usaha pun tidak terlalu membutuhkan laporan keuangan tersebut. Saat pra-penelitian menurut staff keuangan di *Nursery*

Floribunda pemiliknya tidak membutuhkan laporan keuangan yang terpenting adalah tidak ada hutang di luar usaha yang dijalankan.

UMKM diartikan sebagai kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional (Salmiah dkk, 2015 hlm.213). Pada UU RI No. 20 Tahun 2008 dijelaskan terdapat kriteria jenis usaha yaitu usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Masing-masing usaha memiliki kriteria sendiri, UMKM memiliki standar akuntansi keuangan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI). IAI mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP karena mengatur transaksi yang umumnya dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukuran di dalam SAK EMKM dengan menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya saja. Dengan diterbitkannya SAK EMKM ini sebagai bentuk dukungan IAI sebagai organisasi profesi akuntan, dalam meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan entitas, sekaligus mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia (IAI, 2016). Adanya SAK EMKM dapat membantu para pelaku usaha dapat dengan mudah menerapkan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang dapat dikatakan handal.

Adriani dkk (2014) melakukan penelitian dengan hasil penelitiannya tersebut menjelaskan bahwa sistem pencatatan yang dibuat oleh UMKM masih sangat sederhana; UMKM tidak menerapkan standar yang ada karena kurang paham, kedisiplinan dan sumber daya manusianya; dan faktor eksternal kurangnya pengawasan dari *stakeholders* yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan Widyastuti (2017), yang menghasilkan bahwa pencatatan keuangan masih dilakukan secara sederhana yang disebabkan kurangnya pengetahuan pengusaha terhadap tujuan, manfaat dan tahapan penyusunan laporan keuangan berbasis SAK-ETAP. Shonhadji, dkk (2017)

penelitian yang dilakukannya mendapatkan hasil bahwa sistem akuntansi yang berlaku pada Usaha jasa laundry mitra memiliki pencatatan keuangan sebatas pada pemasukan dan pengeluaran laundry, sehingga penerapan akuntansi berdasarkan pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang berdasarkan SAK EMKM pada usaha jasa laundry masih sangat lemah. sistem akuntansi yang berlaku pada SAK EMKM. Usaha jasa laundry mitra memiliki pencatatan keuangan sebatas pada pemasukan dan pengeluaran laundry, sehingga penerapan akuntansi berdasarkan pencatatan transaksi dan laporan keuangan yang berdasarkan SAK EMKM pada usaha jasa laundry masih sangat lemah.

Beberapa hasil penelitian di atas, terdapat gap apakah pihak terkait sudah melakukan penyuluhan tentang penerapan laporan keuangan berbasis SAK EMKM bagi para pelaku usaha sektor UMKM dan perilaku para pelaku usaha dalam menyikapi standar yang ada. Dari beberapa penelitian terdahulu dapat diartikan masih adanya kendala yang masih terjadi. Mulai dari kurangnya pemahaman, pencatatan yang sangat sederhana dan juga perilaku yang membuat para pelaku usaha belum melakukan pencatatan sesuai dengan SAK EMKM.

Ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian pada Nursery Floribunda diawali dari permasalahan yang ada. Dari prariset yang dilakukan oleh peneliti, Nursery Floribunda merupakan usaha yang tidak berbadan hukum. Usaha tersebut didirikan oleh satu orang saja. *Nursery Floribunda* melakukan pencatat laporan keuangan hanya pendapatan yang didapat, piutang pembeli dan juga biaya-biaya yang dikeluarkan usaha tersebut. Dari beberapa penelitian di atas terdapat permasalahan yang masih belum terjawab salah satunya adalah perilaku yang dilakukan oleh pelaku usaha mengenai penerapan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan terhadap hasil penelitian terdahulu (*gap research*) maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Penyusunan Laporan Keuangan untuk Nursery Floribunda di Bintaro.**

I.2 Fokus Penelitian

Guna mempertajam penelitian, peneliti menetapkan fokus penelitian. Menurut Moleong (2010 hlm.94) mengatakan penetapan fokus penelitian pada akhirnya akan dipastikan sewaktu peneliti sudah berada di lapangan penelitian, karena bisa terjadi situasi di lapangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian awal. Dengan demikian kepastian tentang fokus dan masalah itu yang menentukan adalah keadaan di lapangan. Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh dari pengamatan langsung yang dilakukan peneliti sehingga memperoleh gambaran umum yang merupakan tahap permukaan tentang situasi sosial. Fokus dalam penelitian ini adalah:

a. Penyajian Laporan Keuangan

Dalam penyajian laporan keuangan yang diterapkan di Nursery Floribunda yaitu apakah pelaku usaha telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. Serta bagaimana perilaku pelaku usaha terhadap penerapan SAK EMKM.

b. Sosialisasi

Sosialisasi bagi UMKM tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah. Dalam hal ini apakah Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah melakukan sosialisasi kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tentang penerapan SAK EMKM.

I.3 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah telah peneliti sampaikan yang di atas, peneliti dapat membangun rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana perilaku pelaku usaha yaitu Nursery Floribunda mengenai SAK EMKM pada laporan keuangan yang dimilikinya?

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan memberikan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

Untuk mengetahui tentang perilaku Nursery Floribunda mengenai SAK EMKM pada laporan keuangan yang dimiliki pelaku usaha.

I.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru dan dapat dijadikan sebagai informasi dan tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya, dan memperoleh pemahaman mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi masyarakat umum, dan para pelaku usaha, yaitu sebagai sarana informasi tentang ketentuan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK EMKM, yang sudah berlaku dan disesuaikan dengan perusahaan yang didirikan.
- 2) Bagi pelaku usaha, diharapkan dapat membantu dalam membuat laporan keuangan yang hadal sesuai dengan SAK EMKM dan dapat membantu untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalankan.